# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU


A.I.N. Kramer SR, *Kamus Kantong Inggris Indonesia,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)

Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Sinar Grafika: 2008)

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta,1994)

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009)

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta; Sinar Grafikan, 2003)

Himpunan *Peraturan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, (2004)

Hartono, Sunaryati, Konsorsium Hukum Progresif, 2013, Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, judul: *Membangun Hukum Nasional Indonesia menjadi Hukum yang Progresif dan Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masyarakat Masa Kini dan Masa Depan,* ( Yogjakarta, Thafa Media, 2013)

Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurismetri*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

John M. Echols dan Hasan Sadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977)

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogjakarta: Liberty, 2009)

Moh. Mahfud MD, Konsorsium Hukum Progresif, 2013, Dekontruksi dan




PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNDIP

Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, judul: inilah Hukum Progresif Indonesia, ( Yogjakarta, Thafa Media, 2013)

Nawawi, Barda Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana)

P.A.F. lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan jabatan dan Kejahatan-Kejahatan jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung; Pionir Jaya, 1991)

Patrialis Akbar, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/ PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2013

Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi UU No. 20 tahun 2001*, (Bandung; Mandar Maju, 2009)

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Serikat, Nyoman PJ., *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, ( Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005)

Shidarta, Konsorsium Hukum Progresif, 2013, Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, judul: Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi, ( Yogjakarta, Thafa Media, 2013)

Suyatno, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1976)


PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNDIP

**PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

**SUMBER LAIN**

Internet :

www.mahkamahkonstitusi.com


PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNDIP